

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR  
MINUM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**(Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Dewarejo di Desa Selorejo,  
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)**

Oleh:

**SILFA ARI PRADANA**

**NPM 21701091020**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU AD  
MINISTRASI NEGARA**

**2022**



## RINGKASAN

Silfa Ari Pradana, 2021, NPM 21701091020 **Efektivitas Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dewarejo Di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)** Pembimbing Utama, Dr. H.Slamet Muchsin, M.Si, Pembimbing Kedua, Dr.Hayat, S.A.P., M.Si

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dewarejo Di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) .Dengan uraian permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Efektivitas tata kelola Hippiam yang di kelola oleh BUMDes?. 2) Seberapa besar manfaat Hippiam yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat?. 3).Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Hippiam (Himpunan penduduk pemakai air minum).

Hasil Penelitian dalam penulisan ini, Mengetahui tentang Efektivitas Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dewarejo Di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang): Terdapat 6 faktor untuk mengukur tingkat efektivitas usaha yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Hippiam Selorejo dinilai dari prinsip kooperatif bahwa BUMDes Hippiam telah menerapkan prinsip kooperatif. Hal ini dinilai karena adanya perbaikan dari sisi organisasi untuk perbaikan pengelolaan BUMDes Hippiam. Segi partisipatif dan emansipatif bahwa prinsip partisipatif sudah dilaksanakan baik dari masyarakat maupun petugas. Namun untuk petugas BUMDes Hippiam belum secara maksimal. Adapun manfaat ekonomi yang dirasakan karena tarif Hippiam yang sama setiap penggunaan dan murah. Manfaat sosial yang didapat yaitu bahwa Hippiam Selorejo berorientasi sosial dan hal tersebut dinyatakan tercapai karena terbukti adanya subsidi silang yang diberikan kepada masyarakat.Manfaat budaya dan kerukunan bahwa dengan adanya Hippiam Selorejo ini masyarakat semakin terjaga kerukunannya, karena adanya Hippiam ini semakin membuat masyarakat lebih toleransi dan gotong-royong. Sedangkan manfaat lain yang dirasakan yaitu air yang mudah diakses masyarakat. Sebelum adanya Hippiam akses air sulit. Sekarang bahkan air melimpah hingga dapat digunakan sebagai pengairan lahan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pengelolaan, BUMDes, Hippiam.*

## SUMMARY

Silfa Ari Pradana, 2021, NPM 21701091020 Effectiveness of Management of Drinking Water User Population Associations for Community Welfare (Case Study on a Business Entity Owned by Desa Dewarejo in Selorejo Village, Dau District, Malang Regency) Main Advisor, Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, Second Advisor, Dr. Hayat, S.A.P., M.Si

The study was conducted to determine the Effectiveness of the Management of the Association of Drinking Water Users for Community Welfare (Case Study on a Business Entity Owned by Dewarejo Village in Selorejo Village, Dau District, Malang Regency). BUMDes?. 2) How much is the benefit of Hippam provided by BUMDes to the community? 3). What are the inhibiting and supporting factors in the management of Hippam (Drinking water user population association)?.

The results of the research in this writing, Knowing about the Effectiveness of the Management of the Association of Drinking Water Users for Community Welfare (Case Study on a Business Entity Owned by Dewarejo Village in Selorejo Village, Dau District, Malang Regency): There are 6 factors to measure the level of business effectiveness, namely: cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable, and sustainable. Hippam Selorejo was judged from the cooperative principle that Hippam BUMDes had applied the cooperative principle. This is assessed because of improvements from the organizational side to improve the management of BUMDes Hippam. The participatory and emancipatory aspect that the participatory principle has been implemented by both the community and officials. However, for BUMDes Hippam officers, it is not optimal. The economic benefits are felt because Hippam rates are the same for every use and are cheap. The social benefits obtained are that Hippam Selorejo is socially oriented and this is stated to be achieved because it is proven that there are cross subsidies given to the community. mutual cooperation. Meanwhile, another perceived benefit is that water is easily accessible to the public. Before Hippam, access to water was difficult. Now even the water is so abundant that it can be used as community land irrigation.

Keywords: *Effectiveness, Management, BUMDes, Hippam.*

## BAB I PEDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2040, Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat Kabupaten Malang memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih dengan sistem perpipaan diperoleh dari Perumda Tirta Kanjuruhan yang merupakan perusahaan milik daerah, dan swadaya masyarakat melalui kelompok Hippam (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Hingga saat ini tingkat pelayanan air bersih di Kabupaten Malang mencapai 92,08% dari seluruh penduduk Kabupaten Malang (Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, 2020). Dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, 26 Kecamatan telah mendapat pelayanan air bersih secara perpipaan yang dikelola Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Jumlah jiwa terlayani oleh jaringan pipa air bersih dari Perumda Tirta Kanjuruhan Malang mencapai 35,91% dari jumlah penduduk kabupaten Malang yang sebanyak 2,65 juta orang. Sedangkan 19,47% penduduk Kabupaten Malang memperoleh air bersih dari jaringan perpipaan yang dikelola secara swadaya masyarakat dengan membentuk Hippam. Selain itu masyarakat Kabupaten Malang juga memperoleh pelayanan air bersih secara swadaya non perpipaan melalui sumur gali, mata air dan mobil tangki pada wilayah-wilayah yang sulit air secara geografis

dan demografis. Terdapat 38 desa rawan air yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Malang yang mendapat layanan air bersih mobil tangki khususnya pada saat musim kemarau. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan. Pelayanan air bersih di ibukota Kabupaten Malang. (Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2020).

Dari peraturan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten malang semata untuk mensejahterakan masyarakat yang ada sehingga masyarakat mendapatkan hak memakai air sehari-hari, tujuan dari komitmen pemerintah Republik Indonesia khususnya Presiden Jokowi Dodo yang dimana seluruh pemerintah yang berada di wilayahnya masing-masing agar membuat kebijakan yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada, dengan demikian kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kesejahteraan merupakan salah satu misi pemerintah untuk negara, yang dimana negara menjamin hak untuk keselamatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya, yang dimana poin ke lima dalam pancasila yaitu” Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam poin penting yang dimana pemerintah harus bisa mensejahterakan seluruh warga Indonesia tanpa ada memandang ras maupun suku, dan negara harus menjamin seluruh masyarakatnya. Mensejahterkan berarti menjamin kebutuhan yang masih kurang, dengan hadir peran pemerintah untuk memberikan fasilitas seperti HPPAM sangat cukup membantu masyarakat yang kesulitan mendapat air untuk kebutuhan sehari-hari demi untuk



keberlangsungan hidup, dengan Hadirnya Hippiam pemerintah sangat membantu untuk memenuhi kebetuhan masyarakat yang memiliki kendala atau kurang dalam mendapatkan air. Dengan demikian kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan Air, Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian yang dirasakan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat mengayomi karena tergantung dari apa diberikan atau yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat" dengan demikian kesejahteraan dapat di mengerti dengan mudah yaitu ketenangan lahir dan batin.

Dengan adanya kesejahteraan yang dimana pemerintah berperan penting dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan benar untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Adapaun pelayanan publik yang dimana Menurut Hayat, (2018:22)"Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah, pelayan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak". Dengan dijelaskan maksud dari kebijakan publik tersebut pemerintah sangat berperan penting untuk memperhatikan kualitas hidup seluruh masyarakatnya agar lebih baik, dengan adanya kebijakan public masyarakat tidak khawatir lagi dalam mendapatkan pelayan, karena pemerintah hadir

yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat, sehingga pelayan tersebut dibuat sedemikian rupa untuk menjamin kenyamanan masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur tata kelola kebijakan yang tindakan untuk memfasilitasi kebutuhan publik ataupun kebutuhan masyarakat, dengan demikian kebijakan publik bisa dikatakan berjalan ketika bisa memberikan kebijakan yang baik dan benar kepada masyarakat sesuai dengan peraturan ataupun sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan publik tentu adanya pelayanan publik yang baik dan benar, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan sesuai dengan yang diinginkan, adapun indikator-indikator menurut Wibowo, dalam Hayat (2017;75) yang dimana dijelaskan antara lain:

- a) Tujuan adalah hasil dari sebuah proses yang berjalan dalam sebuah sistem yang dibangun atas dasar keinginan, kebutuhan, atau persyaratan yang melekat. Yang dimana suatu proses yang di jalankan pasti mempunyai tujuan.
- b) Standar merupakan ukuran atau pencapaian terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang dimana standar memiliki perencanaan, pelaksanaan, maupun pada Efektivitas pada suatu kebijakan yang dibuat.
- c) Umpan balik merupakan tanggapan langsung dari pengamatan sebagai hasil kelakuan dari individu yang lain. Yang dimana saling memberikan masukan atau tanggapan antara dua pembicara.



- d) Alat atau sarana, tanpa alat dan prasarana, kinerja tidak akan maksimal. Sumber daya manusia tidak bisa bekerja tanpa sarana prasarana. Sehingga di butuhkan prasarana untuk mejamin keberlangsungan suatu kinerja yang dijalankan agar lebih maksimal.
- e) Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemampuan dalam suatu bidang yang jalankan merupakan hal yang diinginkan oleh suatu instansi untuk keberhasilan suatu organisasi tersebut.
- f) Peluang adalah suatu kesempatan bagi setiap pegawai untuk menunjukan prestasinya. Dengan adanya peluang staff atau pegawai yang memegang jabatan bisa menunjukan kempuannya untuk memajukan atau menjadikan instansi tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- g) Motif merupakan pendorong dari apa yang sudah dan akan dilakukan oleh seseorang.

Dengan manajemen pelayanan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang benar sesuai dengan aturan yang ada sehingga memberikan dampak pelayanan benar dan baik. Dengan adanya pelayanan publik masyarakat akan mendapat hak atas dasar tentang negara menjamin hak keselamatan dan kesehatan masyarakatnya.

Dengan adanya manajemen pelayanan publik tidak luput jauh dari suatu Efektivitas yang dimana Efektivitas mempunya keterikatan dengan kebijakan, yang dimana Efektivitas merupakan hasil dari suatu kebijakan yang pernah dijalan dalam sautu organisasi yang dimana dengan adanya Efektivitas, suatu organisasi atau apa saja

yang menjadi penghambat atau kendala selama organisasi tersebut berjalan, sehingga Efektivitas sangat penting untuk dilakukan dalam suatu kebijakan yang dibuat sehingga nanti menjadi tolak ukur suatu kebijakan yang akan dibuat, yang dimana ketika suatu organisasi ingin menjalankan misinya sudah ada pandangan kedepannya dengan adanya Efektivitas tersebut akan menjadi tolak ukur suatu kebijakan yang akan dibuat dengan demikian ketika kebijakan dibuat permasalahan sebelumnya sudah terjadi, bisa di minimaslisirkan dengan baik, sehingga misi organisasi akan mencapai tujuan yang ingin capai.

Dengan adanya Efektivitas tidak luput dari suatu kebijakan yang dibuat sehingga tercipta pelayan publik yang dijalankan oleh pemerintah yang dimana pemerintah, menuhi kebutuhan seperti Hippam yang dimana peran atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus menjamin kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan seluruh masyarakat yang berada di kota sampai ke desa, dengan demikian pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang, Pada Pasal 17, Undang-Undang No 17 Tahun 2019 menyebutkan Pemerintah desa atau yang disebut dengan BUMDes, memiliki tugas meliputi, a. membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain, b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya, c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air, d. membantu Pemerintah

Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.

Adapun Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang didefinisikan pada pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik desa selanjutnya di sebut Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui suatu pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk suatu kesejahteraan masyarakat Desa. Dapat disimpulkan pemerintah desa sangat berperan penting dalam suatu pengembangan dalam suatu negara, dimana Presiden Jokowi pada tahun 2014 menyebutkan desa mempunyai peran penting dalam pengembangan Negara Indonesia, dengan demikian kesejahteraan merupakan suatu hal utama dalam kehidupan bermasyarakat, yang ingin dimiliki oleh masyarakat, dengan demikian pemerintah desa mendapatkan hak untuk mengatur wilayahnya masing-masing untuk suatu kepentingan yang positif, seperti mensejahterakan masyarakat dengan demikian perkembangan dan kesejahteraan dapat dirasakan ketika pemerintah desanya bisa mengelola aset desanya yang ada, seperti sumber daya alam (SDA), dengan demikian kesejahteraan merupakan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan salah satu misi negara yaitu bagaimana untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya.

Permasalahannya

Dimana penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut pengembangan dan tata kelola ataupun kebijakan yang di buat oleh BUMDes tentang tata kelola HPPM. Baik

dalam bidang pengembangan usaha masyarakat, maupun bidang usaha yang di gagas oleh pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan sehingga penelitian ini ingin lebih mengetahui apa saja kebijakan yang dijalankan.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Hippam Oleh Badan Usaha Milik Desa Dewarejo Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Selorejo Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, peneliti ingin menjawab dari problem yang terjadi.

1. Bagaimana Efektivitas tata kelola Hippam yang di kelola oleh BUMDes di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Seberapa besar manfaat Hippam yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Hippam (Himpunan penduduk pemakai air minum) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Ingin mengetahui efektivitas tata kelola Hippam yang di kelola oleh BUMDes di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

- 2) Ingin mengetahui seberapa besar manfaat Hippiam yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- 3) Ingin mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan Hippiam yang di kelola oleh BUMDes di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa hasil yang sudah diteliti dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan memberikan paparan pemahaman terhadap Efektivitas tata kelola Hippiam, dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian untuk kedepannya, Sebagai refrensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, agar dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam tata kelola Hippiam selanjutnya, dan bermanfaat bagi para pembaca,
2. Bagi pihak intansi memberikan refrensi terhadap tata kelola Hippiam dengan demikian mempunyai bahan acuan atau perbandingan.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dibuat yaitu:

1. Terdapat 6 faktor untuk mengukur tingkat efektivitas usaha yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Hippam Selorejo dinilai dari prinsip kooperatif bahwa BUMDes Hippam telah menerapkan prinsip kooperatif. Hal ini dinilai karena adanya perbaikan dari sisi organisasi untuk perbaikan pengelolaan BUMDes Hippam. Segi partisipatif dan emansipatif bahwa prinsip partisipatif sudah dilaksanakan baik dari masyarakat maupun petugas. Namun untuk petugas BUMDes Hippam belum secara maksimal. Bantuan diberikan bagi masyarakat yang kurang mampu. BUMDes Hippam Selorejo telah menerapkan prinsip transparan, hal ini dibuktikan dengan pelaporan pertanggungjawaban yang terkelola dengan baik dan terbuka diumumkan di rapat MUSDES. Sedangkan untuk prinsip sustainable bahwa BUMDes Hippam belum menerapkan prinsip sustainabel, hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya BUMDes Hippam belum memunculkan gagasan untuk memunculkan usaha-usaha yang lain.
2. BUMDes Hippam desa Selorejo memberikan manfaat pada masyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya dan kerukunan, serta manfaat lain. Adapun manfaat ekonomi yang dirasakan karena tarif Hippam yang sama setiap

penggunaan dan murah. Manfaat sosial yang didapat yaitu bahwa Hippam Selorejo berorientasi sosial dan hal tersebut dinyatakan tercapai karena terbukti adanya subsidi silang yang diberikan kepada masyarakat. Manfaat budaya dan kerukunan bahwa dengan adanya Hippam Selorejo ini masyarakat semakin terjaga kerukunannya, karena adanya Hippam ini semakin membuat masyarakat lebih toleransi dan gotong-royong. Sedangkan manfaat lain yang dirasakan yaitu air yang mudah diakses masyarakat. Sebelum adanya Hippam akses air sulit. Sekarang bahkan air melimpah hingga dapat digunakan sebagai pengairan lahan masyarakat.

3. Faktor penghambatnya yaitu kurang adanya kekompakan atau kerjasama antara pihak pengurus pengelola BUMDes Hippam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pendapat yang berbeda antara ketua BUMDes dengan ketua Hippam. Faktor penghambat lainnya berasal dari kurangnya modal untuk mengembangkan usaha Hippam ini. Sedangkan faktor pendukung yaitu melimpahnya sumberdaya alam dan adanya dukungan dari pihak ketiga.

### 1.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan jenis penelitian komparatif, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan untuk memperbaiki manajemen BUMDes Hippam Selorejo.
2. Menambah sampel untuk diwawancarai, untuk memperbanyak sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai data.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hayat, Januari 2017, Manajemen Pelayanan Publik, Penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok. Jl. Raya Leuwilinggung, No. 122, Kel. Leuwilinggung, Kec, Tapos, Kota Depok 16956. Tel/fax : (021)84311162- (021)84311163. Email: [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

Hayat Juli 2018, Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi) penerbit Intrans Publishing, Wismakalimetro, jl. Joyo Metro 42 Malang, Jatim. Telp. 0341-573650 Fax, Email Pernaskahan : [redaksi.interans@gmail.com](mailto:redaksi.interans@gmail.com) , Email Pemasaran: [interans\\_malang@yahoo.com](mailto:interans_malang@yahoo.com) , Website: [www.interanspublishing.com](http://www.interanspublishing.com)

Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUMDdes) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007.

Nugroho.,Riant., 2009., Public Policy., Yogyakarta: UGM Press.

Nugroho.,Riant.2014. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta. Putaka Pelajar.

Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi

Mahmudi. 2010. Managemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN. Yogyakarta

ugroho. 2003. Good Governmance. Mandar Maju. Bandung

Terry, George. 2009. Prinsip-prinsip managemen cetakan 10. PT.Bumi Aksara. Jakarta

## Jurnal

Fardika Wahyu Pujangga, Efektivitas Pengelolaan Air Bersih Oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) Studi Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, 12040674214 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: [fardika.pujangga@gmail.com](mailto:fardika.pujangga@gmail.com)

Sugiono.2017.Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta

Sugiono.2005. memahami penelitian kualitatif.Bandung: CV. Karya.

Sunarti dan Ali Khomsan. 2012. Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan?. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Debby D. V. Kawengian Joyce Jacinta Rares, 2015 Evaluasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafficking) terutama perempuan dan anak di kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara e-mail: [Debbykawengian@yahoo.com](mailto:Debbykawengian@yahoo.com).

## Undang-Undang

Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2040.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2019. Tentang Sumber Daya Air.